

**PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI PADA BPKPD KABUPATEN POHUWATO)**

**Oleh**

**INDRIANI LIHAWA  
E1119100**

**SKRIPSI**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL AKUNTABILITAS DAN  
TRANSARANSI PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI PADA BPKPD KABUPATEN POHUWATO)**

Oleh

**INDRIYANI LIHAWA  
E1119100**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
dan Telah di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal  
Gorontalo, 11 Mei 2023

**PEMBIMBING I**



Sulfianty, SE.,M.Si  
NIDN : 09 030984 03

**PEMBIMBING II**



Kartini Muslimin, SE.,M.Ak  
NIDN : 09 131276 01

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL AKUNTABILITAS DAN TRANSARANSI PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA BPKPD KABUPATEN POHUWATO)

Oleh

INDRIYANI LIHAWA  
E1119100

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Purnama Sari, SE.,M.Si**  
(Ketua Penguji)
2. **Taufik Udango, SE.,M.Ak**  
(Anggota Penguji)
3. **Agus Baku, SE.,M.Si**  
(Anggota Penguji)
4. **Sulfianty, SE.,M.Si**  
(Pembimbing Utama)
5. **Kartini Muslimin, SE.,M.Ak**  
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,



Ketua Program Studi Akuntansi  
Shella Budawati, SE.,M.Ak  
NIDN : 09 210892 02

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di universitas ichsan gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan ini.

Gorontalo,.....

Yang Membuat Pernyataan



## **ABSTRACT**

**INDRIYANI LIHAWA. E1119100. THE EFFECT OF INTERNAL SUPERVISION, ACCOUNTABILITY, AND TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ON LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE (A STUDY AT THE REGIONAL FINANCIAL AND REVENUE MANAGEMENT AGENCY OF POHUWATO DISTRICT)**

*The research is aimed at finding the effect of internal supervision, accountability, and transparency of local financial management on local government performance partially and simultaneously. This research is comparative causal research with a quantitative approach. The research population covers officials of the Regional Financial and Revenue Management Agency of Pohuwato District. The data analysis method employs multiple linear regression. The results show that internal supervision, accountability, and transparency of regional financial management partially have a significant effect on local government performance. While internal supervision, accountability, and transparency of regional financial management simultaneously have a significant effect on local government performance.*

*Keywords:* *internal control, accountability, transparency of regional financial management, local government performance*

## **ABSTRAK**

INDRIYANI LIHAWA. NIM : E1119100 PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA BPKPD KABUPATEN POHUWATO).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah secara parsial dan simultan. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

**Kata kunci :** Pengawasan internal, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya. Dengan nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pengawasan, Internal Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada BPKPD Kabupaten Pohuwato)”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Kepada kedua orang tua yang tercinta, terima kasih atas cinta kasih dan pengorbanan ayah dan ibu yang tidak akan pernah dapat terbalas.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT)
- Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
- Bapak Dr. Musafir, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

- Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo
- Ibu Sulfiandy, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, waktu, dan motivasi bagi penulis.
- Bapak Kartini Muslimin, SE.,M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis.
- Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membagi ilmu pengetahuan yang pasti akan bermanfaat bagi saya.
- Seluruh pegawai dan staf administrasi di Universitas Ichsan Gorontali yang telah membantu saya dalam menyelesaikan kelengakapan administrasi.
- Seluruh teman-teman yang selalu ada memberi semangat sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari atas keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran. Akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, ..... 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>9</b>
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1 Kinerja.....	9
2.1.2 Pengawasan Internal.....	11
2.1.3 Akuntabilitas .....	14
2.1.4 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu .....	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
2.4 Hipotesis.....	20
<b>BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>

3.1 Obyek Penelitian .....	22
3.2 Metode Penelitian .....	22
3.2.1 Desain Penelitian.....	22
3.2.2 Operasional Variabel.....	22
3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	24
3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.2.6 Metode Analisis Data.....	26
3.2.6.1 Statistik Deskriptif .....	26
3.2.6.2 Uji Kualitas Data.....	27
3.2.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	28
3.2.6.4 Analisis regresi linier berganda.....	29
3.2.6.5 Uji hipotesis .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pohuwato.....	32
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pohuwato .....	32
4.1.2 Visi dan Misi .....	33
4.1.3 Tugas, Sasaran, dan Strategi .....	35
4.1.4 Kebijakan, Tugas, dan Fungsi .....	37
4.2 Karakteristik Responden .....	38
4.3 Statistik Deskriptif.....	41
4.4 Hasil Uji Kualitas Data .....	42
4.4.1 Hasil Uji Validitas .....	42
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas .....	44
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	45
4.5.1 Hasil Uji Normalitas.....	46
4.5.2 Hasil Uji Multikoleniaritas.....	46
4.5.3 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	47
4.6 Hasil Uji Hipotesis .....	48

4.6.1 Hasil Uji Regresi berganda .....	48
4.6.2 Hasil Uji t .....	50
4.6.3 Hasil Uji F .....	51
4.6.4 Koefisien Determinasi .....	51
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian .....	52
4.7.1 Pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah .....	52
4.7.2 Akuntabilitas .....	53
4.7.3 Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.....	53
4.7.4 Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah.....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Rincian Penyebaran dan Pengembalian kuesioner.....	38
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	39
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	39
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	40
Tabel 4.5	Karaktersitik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	40
Tabel 4.6	Deskriptif Statistik .....	41
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Pengawasan Internal (X1).....	42
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X2).....	43
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Transparansi (X3) .....	43
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Kinerja Pemerintah daerah (Y) .....	44
Tabel 4.12	Hasil Uji Reliabilitas.....	45
Tabel 4.13	Hasil <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	46
Tabel 4.14	Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4.15	<i>Cofficients</i> .....	49
Tabel 4.16	Anova .....	51
Tabel 4.17	Koefisien Determinasi .....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	19
Gambar 4.1 Logo .....	33
Gambar 4.2 Scatterplot.....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Jadwal Penelitian .....	58
Lampiran 2 Struktur organisasi .....	59
Lampiran 3 <i>Abstract</i> .....	60
Lampiran 4 Abstrak .....	61
Lampiran 5 Kuesioner .....	62
Lampiran 6 Hasil Jawaban Kuesioner pengawasan Internal (X1) .....	68
Lampiran 7 Hasil Jawaban Kuesioner Akuntabilitas (X2) .....	80
Lampiran 8 Hasil Jawaban Kuesioner Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X3).....	82
Lampiran 9 Hasil Jawaban Kuesioner Kinerja Pemerintah Daerah (Y) .....	84
Lampiran 10 Statistik Deskriptif.....	86
Lampiran 11 Uji Validitas.....	87
Lampiran 12 Hasil Uji Reliabilitas .....	90
Lampiran 13 Hasil Uji Normalitas.....	93
Lampiran 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	94
Lampiran 15 Hasil Output Regression.....	95
Lampiran 16 Surat Keterangan Penelitian .....	96
Lampiran 17 Surat Balasan Penelitian .....	97
Lampiran 18 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	98
Lampiran 19 Hasil Turnitin.....	99
Lampiran 20 <i>Curriculum Vitae</i> .....	103

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Halim, 2007:47). Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan diberbagaiorganisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintahan, dan juga perguruan tinggi. Demikian juga kinerja masuk dalam setiap aspek sosial ekonomi kemasyarakatan. Kondisi ini terlihat dari banyak organisasi yang memasukkan kata kinerja dalam visi dan misinya. Pencapaian kinerja tidak hanya diharapkan pada karyawan saja melainkan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kinerja kelembagaan.

Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output yang berkualitas, membandingkan hasil kerja dengan rencana

kerja, serta menunjukkan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari prespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak menjadi tolak ukur keberhasilan dikarenakan sifat dasarnya yang tidak mencari profit. Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Saefulloh, 2013:31).

Dalam meningkatkan kinerja organisasi tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja, baik yang telah dibuktikan secara empiris oleh peneliti-peneliti terdahulu maupun faktor-faktor yang belum dimasukkan dalam penelitian. Faktor yang pertama dalam menunjang dan memperkuat kinerja, yaitu Pengawasan Internal. Pengawasan Internal merupakan suatu bentuk dari kegiatan pengawasan yang berfungsi untuk mengantisipasi, memonitor, dan menghindari kesalahan tugas-tugas organisasi agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan serta didukung dengan beberapa indikator untuk melakukan Pengawasan Internal. Hal ini harus mendapat perhatian secara khusus dalam setiap kegiatan agar dapat terwujud atau setidaknya dapat mendekati suatu bentuk tujuan yang diinginkan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengawasan dapat ditujukan ke dalam bidang internal maupun bidang eksternal. Pengawasan Internal merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan. Jika dirinci lebih lanjut, Pengawasan Internal ini pun dapat dibagi menjadi Pengawasan Internal dalam arti sempit dan Pengawasan Internal dalam arti luas. Pengawasan Internal dalam arti sempit adalah Pengawasan Internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal departemen atau lembaga negara yang diawasi. Pengawasan Internal dalam arti luas adalah Pengawasan Internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawasan, yang dibentuk secara internal oleh pemerintah dan lembaga eksekutif.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance*, kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan Internal ini dilakukan mulai dari proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Inspektorat daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi

pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, inspektorat daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Dilihat dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah yaitu akuntabilitas. Di satu sisi akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik (Abdul, 2016: 56). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Muindro, 2013:14). Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan

dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Menurut Halim (2016:56) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2004:30).

Pengukuran kinerja pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Menurut Dwiyanto (2006:50) terdapat lima indikator pengukuran kinerja meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan Pemda yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Pemda.

Pada dasarnya penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020), perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitian ini peneliti hanya berfokus pada satu SKPD yakni Badan Pengelola keuangan Kabupaten Pohuwato. Sedangkan pada Jatmiko (2020) dimana objek penelitiannya mengambil seluruh Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap

Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan masalah yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah, rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah penerapan pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah penerapan pengawasan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, terutama data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pengawasan akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang bidang akuntansi khususnya terkait dengan penerapan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan kinerja instansi pemerintah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk dibandingkan dengan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk dapat mengevaluasi penerapan Pengawasan, akuntabilitas dan transparansi dalam

meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di waktu yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Kinerja**

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual perfomance yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang atau kelompok. Dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (pasal 1 ayat 5) Kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Kinerja adalah gambaran akan tingkat sebuah pencapaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dijalankan sesuai dengan standar tertentu dan bertanggungjawab penuh untuk memberikan laporan kepada pemberi kerja. Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam menjalankan semua aktifitasnya harus dicatat dan diukur. Pernyataan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah seringkali menjadi dasar topik utama yang diperbincangkan oleh publik. Dalam krisis ekonomi yang terjadi dapat disebabkan karena tata kelola yang buruk pada sebagian besar pelaku ekonomi. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut agar bisa meningkatkan kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya. Salah satu cara untuk memulihkan kembali kepercayaan

masyarakat dalam hal kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta pelayanan yang efektif dan efisien, dan juga pembagian tugas yang lebih baik lagi pada pemerintah tersebut seperti pembagian sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan bertanggungjawab pada publiknya. (Pujiono dan Puspitasari,2016).

Menurut Edison (2016), Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang menunjukan dan diukur selama periode tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka yang dimaksudkan dengan Kinerja Pemerintah Daerah adalah pegawai yang mampu melibatkan diri dalam pengelolaan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan daerah sudah ditetapkan. Pada variabel ini pencapaian target dalam suatu kegiatan terhadap kehidupan masyarakat tingkat pencapaian program dan moral perilaku pegawai. (Budi 2015) Dimensi dari variabel ini adalah:

1. Kesesuaian dengan standar pengelolaan keuangan
2. Pencapaian efisien operasional
3. Pencapaian target kinerja dari suatu program
4. Ketepatan dan kesuaian hasil
5. Tingkat pencapain program
6. Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat serta
7. Moral perilaku pegawain, instrument dan pengukuran.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja untuk membantu

kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan suatu tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasikan apakah tingkat pelayanan yang diberikan oleh para pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Edison 2016).

### **2.1.2 Pengawasan internal**

Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan karena dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal dan tepat. Secara keseluruhan dapat kita ketahui dalam suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencegah dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan dapat membantu melaksanakan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Baldrick (2017:63) pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Maka dari itu pemerintah daerah harus mengadakan yang adanya pengawasan keuangan daerah sehingga

bisa mengontrolkan keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga pada dasarnya tindakan pengawasan ini sangat aktif karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang luar dugaan.

Menurut Sabeni dan Imam (dalam anggriawan, 2020) mengartikan bahwa Pengawasan Internal merupakan suatu alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pengawasan secara umum dirumuskan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mengamati dan menilai terkait dengan suatu kegiatan tertentu.

Menurut Rohman (2009:68) menyebutkan bahwa Pengendalian internal dan Pengawasan internal merupakan istilah yang mempunyai makna yang hampir sama. Kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian untuk menyatakan kondisi yang hampir sama. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Menurut Bastian (2006:450) menyatakan ada beberapa unsur pengendalian internal. Adapun unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang kompetensinya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Fungsi dalam pengawasan internal ini adalah membantu pimpinan lembaga dalam penyelenggaraan pemerintah pada bidang :

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik yang sudah selesai ataupun masih berjalan.
2. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas fungsi dari evaluasi tersebut termasuk pengujian secara berurutan laporan yang dihasilkan oleh masingmasing perangkat daerah.
3. Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan alamiah/reguler yang dilaksanakan.
4. Membantu tercapainya pengelolaan lembaga pemerintahan yang baik.

Pengawasan Intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pengaturan Pengawasan Intern dilakukan terhadap kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawa (Rohman, 2009).

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa Pengendalian Intern merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus guna mengamati kinerja pegawai instansi untuk menciptakan suatu kinerja organisasi pemerintah yang baik dimana kegiatan ini dikoordinasi oleh pejabat yang berwenang untuk mendorong atau memotivasi anggota pegawai instansi yang lain. Pengawasan ini nantinya akan menjadikan kinerja pemerintah lebih efektif dan efisien.

### **2.1.3 Akuntabilitas**

Dalam konteks pemerintahan akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* atau pengelolaan pemerintah yang baik, dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju pemerintah yang bersih. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.(Abdul Halim,2006).

Akuntabilitas merupakan kewajiban atas suatu tindakan penyelenggaran pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan, dimana dari tindakan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak yaitu masyarakat.

Menurut Hasniati (2016) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat.

Menurut Halim 2016 menyatakan bahwa akuntabilitas tersebut meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakaian lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka yang dapat dalam menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilaksanakan bukan hanya aktivitas finansial saja.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban berupa menerangkan dan menjawab atas seluruh tindakan kinerja yang telah dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi hingga pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administratif.

Adapun ciri -ciri pemerintahan yang akuntabel adalah sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah secara tepat, terbuka dan cepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang bisa memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan publik secara wajar.
4. Mampu memberikan waktu dan ruang untuk masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

5. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai pemerintah, dengan pertanggungjawaban publik masyarakat bisa menilai pencapaian pelaksanaan program pemerintah.

#### **2.1.4 Transparansi pengelolaan keuangan daerah**

Di dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Aturan transparansi dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi.

Menurut Tanjung (2014:11) Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018: 25), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dari pihak aparat dalam memberikan informasi berupa laporan keuangan dan informasi lain kepada masyarakat secara menyeluruh.

Tujuan dari transparansi ini adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah harus memberikan informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh lembaga adalah :

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya control sosial.
2. Menghindari kesahanlan komunikasi dan perbedaan persepsi
3. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Auditya dkk (2013) dengan judul penelitian analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnama dan Nadirsyah (2016) dengan judul pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi

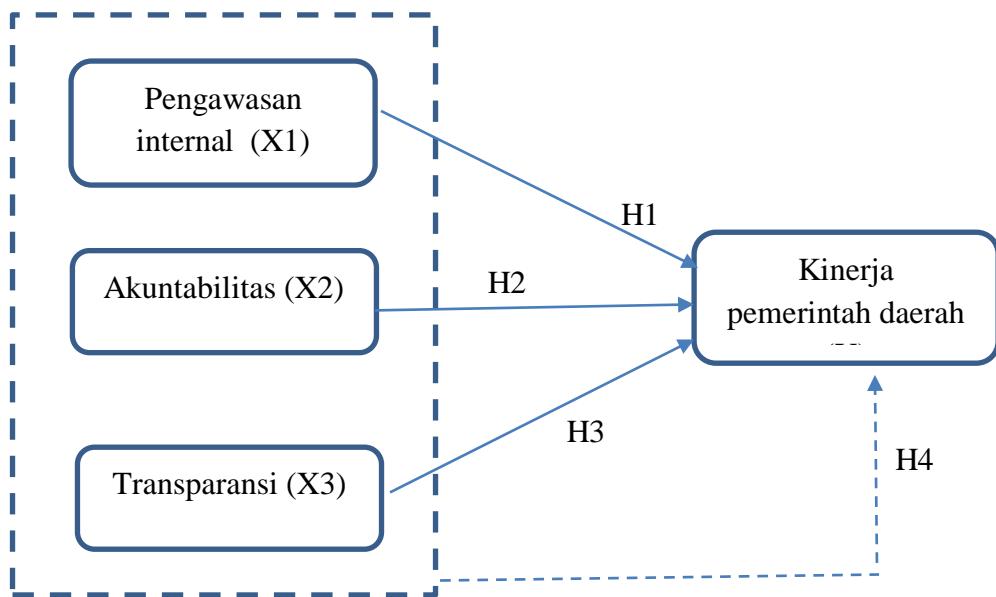
pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) dengan judul pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten sleman. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerjan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuroomah (2021) dengan judul penelitian pengaruh sistem akuntansi, pengawasan internal dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa system akuntansi dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran**



Keterangan :

- > Berpengaruh Simultan
- > Berpengaruh Parsial

Dari badan diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu pengawasan internal. Dengan adanya pengawasan internal yang baik maka akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Maka Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan karena dengan adanya pengawasan yang

baik maka suatu pekerjaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal dan tepat.

Dari bagan diatas menjelaskan bahwa hubungan antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggung jawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini secara langsung dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan suatu kegiatan yang berupa informasi, komunikasi bahkan dalam hal penganggaran kepada masyarakat yang nyata dan jujur sesuai dengan perundang-undangan. Secara langsung pemerintah daerah ingin mendapatkan penilaian dari masyarakat atas kinerjanya. Dengan ini bisa membuat pemerintah berupaya dalam menampilkan kinerja terbaiknya dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya.

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengawasan internal berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Akuntabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
4. Pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **BAB III**

### **OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Obyek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian adalah pengaruh pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Desain penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif (*Causal Comparative Research*). Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah, sedangkan variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dalam penelitian ini adalah pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

##### **3.2.2 Operasional Variabel**

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep indikator yang bertujuan untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini.

## 1. Pengawasan internal

Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Indicator variable pengawasan internal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan job deskripsi. Menggunakan pengukuran skala likert sebagai skala pengukuran data. Skala likert terdiri atas 5 angka penilaian yaitu (1). Sangat tidak setuju, (2). Tidak setuju, (3). Netral, (4). Setuju, dan (5). Sangat setuju.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menjelaskan kinerja dan tindakan badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Indicator variable akuntabilitas keterbukaan, Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas, dan kepekaan yaitu Menggunakan pengukuran skala likert sebagai skala pengukuran data. Skala likert terdiri atas 5 angka penilaian yaitu (1). Sangat tidak setuju, (2). Tidak setuju, (3). Netral, (4). Setuju, dan (5). Sangat setuju.

### 3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dari pihak aparat dalam memberikan informasi berupa laporan keuangan dan informasi lain kepada masyarakat secara menyeluruh.

Indicator variabel transparansi meliputi adanya akses masyarakat, adanya audit yang independen dan efektif. Menggunakan pengukuran skala likert sebagai skala pengukuran data. Skala likert terdiri atas 5 angka penilaian yaitu (1). Sangat tidak setuju, (2). Tidak setuju, (3). Netral, (4). Setuju, dan (5). Sangat setuju

### 4. kinerja pemerintah daerah

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan. sasaran, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Indikator variabel kinerja ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan, kualitas sesuai dengan yang diharapkan, dan manfaat hasil kegiatan. Menggunakan pengukuran skala likert sebagai skala pengukuran data. Skala likert terdiri atas 5 angka penilaian yaitu (1). Sangat tidak setuju, (2). Tidak setuju, (3). Netral, (4). Setuju, dan (5). Sangat setuju.

#### **3.2.3 Populasi dan sampel**

Menurut Sugiyono (2014:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKPD di kabupaten Pohuwato.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling (sederhana) dimana pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara keseluruhan (Sugiyono, 2014:83). Maka sampel dalam penelitian ini adalah 64 responden.

### **3.2.4 Jenis dan sumber data**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka (Suryani dan Hendriyadi, 2016:109). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada pegawai BKD kabupaten Pohuwato.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok. Data ini biasanya dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner atau wawancara. Oleh karena data ini bersumber langsung dari responden, maka diperlukan untuk menguji validitas dan reliabilitasnya (Chandrarin, 2017:123).

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui kuesioner dengan menggunakan daftar pertanyaan/pernyataan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden, berupa data yang berkaitan dengan variabel variabel.

### **3.2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendatangi secara langsung kantor Desa dan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Dalam pengumpulan data, peneliti menunggu responden menjawab semua kuesioner yang telah disediakan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Kuesioner**

Kuesioner yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan (angket) atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengambilan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

- 2. Penelitian kepustakaan**

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis.

### **3.2.6 Metode Analisis Data**

#### **3.2.6.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah analisis statistic yang memberikan gambaran secara umum tentang mengenai karakteristik masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum dan maximum.

Analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018:147).

Analisis ini digunakan dalam menggambarkan demografi responden untuk mengetahui jumlah responden yang akan dibagi sesuai karakteristik yang telah ditentukan, yaitu pertama berdasarkan karakteristik demografi meliputi usia dan jenis kelamin. Dimana deskripsi responden tersebut akan ditampilkan dalam bentuk diagram dan tabel beserta dengan uraian.

### **3.2.6.2 Uji kualitas data**

#### **1. Uji Validitas**

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya pertanyaan pada kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat didalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan variabel yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pertanyaan yang tidak valid atau tidak sah harus dikeluarkan dari kuesioner sebelum disebar kembali ke responden. Menurut Sugiyono (2018) bahwa valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang didapat dari responden.

#### **2. Uji reliabilitas**

Uji reliabilitas berfungsi untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten.

Dengan kata lain, reliabilitas mencirikan tingkat konsistensi. Peneliti menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan. Jika nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,6$  atau 60% menunjukkan instrumen yang digunakan reliabel.

### **3.2.6.3 Uji asumsi klasik**

Sebelum melakukan analisis statistik uji hipotesis dalam hal ini uji analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Data yang digunakan harus bebas dari asumsi klasik meliputi bebas normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

#### **1. Uji normalitas data**

Uji normalitas merupakan salah satu syarat sebelum melakukan uji regresi berganda. Data penelitian harus diuji kenormalan distribusinya untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian menggunakan metode uji Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov Smirnov yaitu sebagai berikut.

1. Jika nilai  $sig > 0,05$  maka data penelitian berdistribusi normal.
2. Jika nilai  $sig < 0,05$  maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

#### **2. Uji multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi diantara

dua atau lebih variabel independen. Cara mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi yaitu dengan cara melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflating Factor* (VIP). Dasar pengambilan keputusan dalam melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflating Factor* yaitu sebagai berikut.

1. Jika nilai Tolerance  $> 0.1$  dan VIP  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai Tolerance  $< 0.1$  dan VIP  $> 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.
3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi gejala heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan uji Gletser. Dasar pengambilan keputusan uji Gletser yaitu sebagai berikut.

1. Jika nilai sig  $> 0,05$  maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
2. Jika nilai sig  $< 0,05$  maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### **3.2.6.4 Analisis regresi linier berganda**

Menurut Hair dkk dalam Yamin (2009), regresi berganda adalah metode analisis yang tepat ketika dalam penelitian melibatkan satu variabel terikat yang diperkirakan berhubungan dengan satu atau lebih variabel bebas.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau dependen. Model persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kinerja pemerintahan daerah
- A = konstanta
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = koefisien regresi
- X<sub>1</sub> = pengawasan internal
- X<sub>2</sub> = akuntabilitas
- X<sub>3</sub> = transparansi pengelolaan keuangan daerah

### **3.2.6.5 Uji hipotesis**

#### **1. Uji t**

Uji t atau uji variable digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dengan derajat kepercayaan sebesar 5% atau 0,05. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat.

#### **2. Uji f**

Uji f atau uji serentak yaitu uji untuk melihat pengaruh semua variable bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dengan

derajat kepercayaan sebesar 5% atau 0,05. Jika Fhitung > Ftabel maka secara bersama-sama (simultan) kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **3. Koefisien determinasi (Uji R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi atau R-square digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variable dependen (variable terikat). Nilai koefisien determinasi antara nol sampai satu. Semakin kecil nilai koefisien determinan berarti semakin terbatas kemampuan variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin nilai koefisien determinan mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Umum BPKPD Kabupaten Pohuwato**

Sejarah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Puhuwato berawal berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Puhuwato Nomor: 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka pada tanggal 6 April 2005 Badang Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan BPKD Kabupaten pohuwato dibentuk.

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pohuwato adalah Penggabungan dari Dua Lembaga Pemerintah Daerah secara terpisah yaitu:

1. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Puhuwato dengan tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan daerah.
2. Bagian Keuangan yang semula tergabung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Puhuwato (SETDA) dengan tugas Pokok dan Fungsi Mengelola Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Puhuwato Nomor: 1 tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Menyesuaikan menjadi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional, efisien,efektif dan akuntabel.

Adapun Misi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparat Pengelola keuangan daerah
3. Meningkatkan pembinaan penatausahaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
4. Meningkatkan sistem saran dan prasarana pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang memenuhi standar pelayanan.



**Gambar 4.1 Logo Kabupaten Pohuwato**

Lambang Daerah Kabupaten Pohuwato pada bagian luar berbentuk segi lima melambangkan Dasar Negara RI yaitu Pancasila.

1. Warna merah jambu adalah warna yang memberi makna kehangatan, kelembutan, kewibawaan dan semangat juang
2. Model Pohon Kelapa yang melengkung memberi makna gerak dinamis yang tidak diam tetapi selalu berbuat untuk masa depan.
3. Gunung, Hutan, Sawah, Laut melambangkan potensi kekayaan sumber Daya Alam Kabupaten Pohuwato sebagai sumber penghidupan Masyarakat.
4. Perahu Layar berwarna hitam dengan layar terkembang warna putih menggambarkan keteguhan dan semangat juang masyarakat Kabupaten Pohuwato dalam mengarungi samudra kehidupan dan menandakan sebagai Kota Pantai.
5. Lingkaran Bola Dunia atau Bumi merupakan makna tempat berpijak dan berjuang seluruh umat manusia dan menggambarkan kebulatan tekad masyarakat Kabupaten Pohuwato dalam berjuang dan membangun.
6. Bintang adalah lambang ketuhanan yang maha esa mengandung makna kepercayaan dan harapan dari masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk selalu mendapat petunjuk dan ridho dari Allah SWT, bentuk bintang berwarna kuning emas juga mengandung makna cita cita yang tinggi dalam meraih kejayaan.

7. Padi, Kapas dan Rantai merupakan lambang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lahir bathin dan merupakan cita-cita hidup seluruh umat manusia dimana rantai memiliki makna bahwa adanya pengakuan persatuan dan kesatuan (Ikatan yang kuat) baik secara lokal, nasional maupun global dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan bathin. Rangkaian gambar padi, kapas dan rantai membentuklingkaran dan bergerak menuju kesatu titik yaitu gambar bintang mengandung makna bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan hidup, manusia harus berusaha dengan giat dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT.
8. Pita berwarna merah dengan tulisan Kabupaten Pohuwato berwarna putih mempunyai makna semangat juang dan keberanian menegakkan kebenaran dan keadilan yang dilandasi dengan hati yang tulus dan suci.

#### **4.1.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi**

Adapun tujuan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan professional
2. Terwujudnya aparatur yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah
3. Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

4. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi standar pelayanan

Adapun sasaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Tersediannya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang pengelolaan keuangan daerah
3. Terlaksananya penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah
4. Terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Adapun strategi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Melaksanakan peningkatan kualitas aparatur melalui bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan dan aset daerah yang memenuhi standar pelayanan.

#### **4.1.4 Kebijakan, Tugas dan Fungsi**

Adapun kebijakan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya aparatur guna peningkatan pembangunan daerah
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai
3. Menyusun peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, tentang penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah
4. Penatausahaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah penataan.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pohuwato dimana didalamnya susunan orgnisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagai penunjang pemerintah daerah, bidang keuangan dan aset memeliki tugas pokok “Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah”

Fungsi menyelenggarakan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato mempunyai fungsi.

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Pengelolaan administrasi keuangan daerah

3. Pelaksanaan pelayanan umum.
4. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis kinerja dan pendapatan daerah
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan.

#### **4.2 Karakteristik Responden Penelitian**

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato sebanyak 64 responden. Setiap responden akan mengisi kuesioner yang dibagikan oleh peneliti serta mencantumkan identitas yang tertera dalam kolom kuesioner yang dibagikan. Peneliti menyebar 64 kuesioner, tetapi hanya 52 kuesioner yang dapat dijadikan data penelitian sedangkan kusioner yang tidak Kembali sebanyak 12 kuesioner. Adapun hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**Table 4.1 Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	64	100
Kuesioner yang tidak kembali	12	18,75
Kuesioner yang digunakan	52	81,25

Sumber : Data Primer, 2023

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis usaha, jenis kelamin, tingkat Pendidikan dan lama usaha.

**Tabel 4.2 karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

<b>Usia Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
20 – 40	35	67,31%
41 – 60	17	32,69%
> 61	0	0
Total	52	100%

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, usia responden yang diteliti paling banyak berusia 20 hingga 40 tahun yaitu sebanyak 35 responden (67,31%), kemudian diikuti oleh yang usia 41 hingga 60 tahun sebanyak 17 responden (32,69%) dan usia > 60 tahun sebanyak 0 responden (0%).

**Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
SMA	3	5,77%
D3	5	9,62%
S1	44	84,61%
S2	0	0%
Total	57	100%

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, kategori tingkat pendidikan dari 52 responden yang telah diteliti diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 44 responden atau sebesar 84,61% dari total keseluruhan responden, tingkat Pendidikan D3 sebanyak 5 responden atau sebesar 9,62% dari total keseluruhan responden, tingkat pendidikan SMA sebanyak 3

responden atau sebesar 5,77% dari total keseluruhan responden, tingkat Pendidikan S2 sebanyak 0 responden atau 0%.

**Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	18	34,62%
Perempuan	34	65,38%
Total	52	100%

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah Perempuan sebesar 65,38% dari keseluruhan jumlah responden. Sedangkan jumlah responden Laki-laki sebesar 34,62%.

**Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja**

Masa Kerja	Jumlah	Persentase
< 5 Tahun	5	9,62%
5 – 10 Tahun	28	53,84%
> 10 tahun	19	36,54%
Total	52	100%

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui masa kerja responden di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato. Masa kerja responden yang diteliti lebih banyak yang bekerja selama 5-10 tahun yaitu sebanyak 28 responden (53,84%), kemudian diikuti responden yang bekerja selama lebih dari 10 tahun sebanyak 19 responden (36,54%), serta responden yang bekerja selama kurang dari 5 tahun sebanyak 5 responden (9,62%).

### 4.3 Statistik Deskriptif

Deskripsi kategori variabel menggambarkan tanggapan responden mengenai pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Deskripsi data yang akan disajikan meliputi nilai mean, minimum, maximum dan deviasi standar.

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengawasan Internal	52	23	35	29.48	2.980
Akuntabilitas	52	26	40	33.50	3.251
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	52	24	40	33.52	3.573
Kinerja Pemerintah Daerah	52	21	35	29.04	3.667
Valid N (listwise)	52				

**Tabel 4.6**

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa pengawasan internal (X1) dengan jumlah sampel 52 memiliki skor terendah 23, skor tertinggi 35 nilai mean 29,48 dan standar deviasi 2,980. Akuntabilitas (X2) dengan jumlah sampel 52 memiliki skor terendah 26, skor tertinggi 40 nilai mean 33,50 dan standar deviasi 3,251. Transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3) dengan jumlah sampel 52 memiliki skor terendah 24, skor tertinggi 40 nilai mean 33,52 dan standar deviasi 3,573. Sedangkan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dengan jumlah sampel 52 memiliki skor terendah 21, skor tertinggi 35 nilai mean 29,04 dan standar deviasi 3,667.

## 4.4 Hasil Uji Kualitas Data

Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

### 4.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner (sugiyono, 2015:173). Kuesioner penggunaan informasi akuntansi pada pelaku umkm, pengetahuan akuntansi, tingkat pendidikan, motivasi kerja kerja dan pengalaman usaha masing-masing berjumlah 5 item butir pertanyaan akan diuji tingkat validitasnya. Kriteria valid atau tidaknya pertanyaan dalam kuesioner adalah apabila nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka kuesioner dinyatakan valid, namun apabila nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka pertanyaan kesioner dinyatakan tidak valid. Adapun pengukuran nilai  $r_{tabel}$  dengan *degree of freedom* yaitu  $n - 2$  ( $n$  adalah jumlah sampel sebanyak 52 responden), maka  $52 - 2 = 50$ , sehingga  $r_{tabel}$  pada tingkat signifikansi sebesar 5% adalah 0,2732.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas pengawasan internal (X1)**

Variable X1	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Kesimpulan
Pernyataan 1	0,782	0,2732	Valid
Pernyataan 2	0,659	0,2732	Valid
Pernyataan 3	0,881	0,2732	Valid
Pernyataan 4	0,880	0,2732	Valid

Pernyataan 5	0,702	0,2732	Valid
Pernyataan 6	0,928	0,2732	Valid
Pernyataan 7	0,827	0,2732	Valid

Sumber : Olahan Data SPSS, 2023

Tabel 4.7 menunjukan bahwa semua r hitung pada pernyataan kuesioner pengawasan internal mempunyai nilai yang lebih besar dari r tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan kuesioner valid.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X2)**

Variable X2	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Kesimpulan
Pernyataan 1	0,828	0,2732	Valid
Pernyataan 2	0,679	0,2732	Valid
Pernyataan 3	0,830	0,2732	Valid
Pernyataan 4	0,821	0,2732	Valid
Pernyataan 5	0,808	0,2732	Valid
Pernyataan 6	0,850	0,2732	Valid
Pernyataan 7	0,818	0,2732	Valid
Pernyataan 8	0,844	0,2732	Valid

Sumber : Olahan Data SPSS, 2023

Tabel 4.8 menunjukan bahwa semua r hitung pada pernyataan kuesioner akuntabilitas mempunyai nilai yang lebih besar dari r tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan kuesioner valid.

**Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Transparansi (X3)**

Variable X3	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Kesimpulan
Pernyataan 1	0,851	0,2732	Valid
Pernyataan 2	0,766	0,2732	Valid
Pernyataan 3	0,841	0,2732	Valid
Pernyataan 4	0,920	0,2732	Valid

Pernyataan 5	0,798	0,2732	Valid
Pernyataan 6	0,892	0,2732	Valid
Pernyataan 7	0,891	0,2732	Valid
Pernyataan 8	0,687	0,2732	Valid

Sumber : Olahan Data SPSS, 2023

Tabel 4.9 menunjukan bahwa semua r hitung pada pernyataan kuesioner transparansi pengelolaan keuangan daerah mempunyai nilai yang lebih besar dari r tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan kuesioner valid.

**Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**

Variable Y	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Kesimpulan
Pernyataan 1	0,833	0,2732	Valid
Pernyataan 2	0,806	0,2732	Valid
Pernyataan 3	0,909	0,2732	Valid
Pernyataan 4	0,883	0,2732	Valid
Pernyataan 5	0,802	0,2732	Valid
Pernyataan 6	0,743	0,2732	Valid
Pernyataan 7	0,829	0,2732	Valid

Sumber : Olahan Data SPSS, 2023

Tabel 4.10 menunjukan bahwa semua r hitung pada pernyataan kuesioner kinerja pemerintah daerah mempunyai nilai yang lebih besar dari r tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan kuesioner valid.

#### 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukan tingkat konsistensi atau kepercayaan pada kuesioner yang dibuat. Tingkat konsistensi yang dimaksud adalah

seberapa besar kuesioner yang dibuat mampu menghasilkan data yang selalu konsisten atau dapat dipercaya dari waktu ke waktu. Jika memang benar maka berapa kalipun data diambil akan menghasilkan data yang selalu tetap dengan keinginan peneliti (Umar, 2013:169). Kriteria yang ditetapkan adalah jika nilai *Cronbach Alpa* diatas 0,60.

**Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas**

Kuesioner	Nilai <i>Cronbach Alpa</i>	Nilai Pembanding
Pengawasan internal	0,912	0,60
Akuntabilitas	0,925	0,60
Transparansi pengelolaan keuangan daerah	0,935	0,60
Kinerja pemerintah daerah	0,919	0,60

Sumber : Olahan Data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel tersebut nilai *Cronbach alpha* dari pengawasan internal, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah semua memiliki nilai yang lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner pengawasan internal, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah, dinyatakan reliabel atau konsisten sehingga dipercaya dapat menghasilkan data yang tetap.

#### **4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu, uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menilai apakah

model regresi yang dihasilkan telah dapat menimbulkan hasil yang biasa atau tidak.

#### 4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak (Umar, 2013). Uji yang dipakai adalah uji *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria dalam model regresi yaitu jika signifikansi di atas 0,05 maka data berdistribusi normal.

**Tabel 4.13**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.44490212
	Absolute	.172
Most Extreme Differences	Positive	.172
	Negative	-.134
Kolmogorov-Smirnov Z		1.243
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan uji normalitas yang digunakan dengan *Kolmogorov Smrinov Asymp.sig.* diperoleh nilai sebesar 0,091 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### 4.5.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel

bebas. Dalam suatu model persamaan regresi linier berganda, dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF (Variabel Inflation Factor) < 10,00.

**Table 4.14**

**Coefficients<sup>a</sup>**

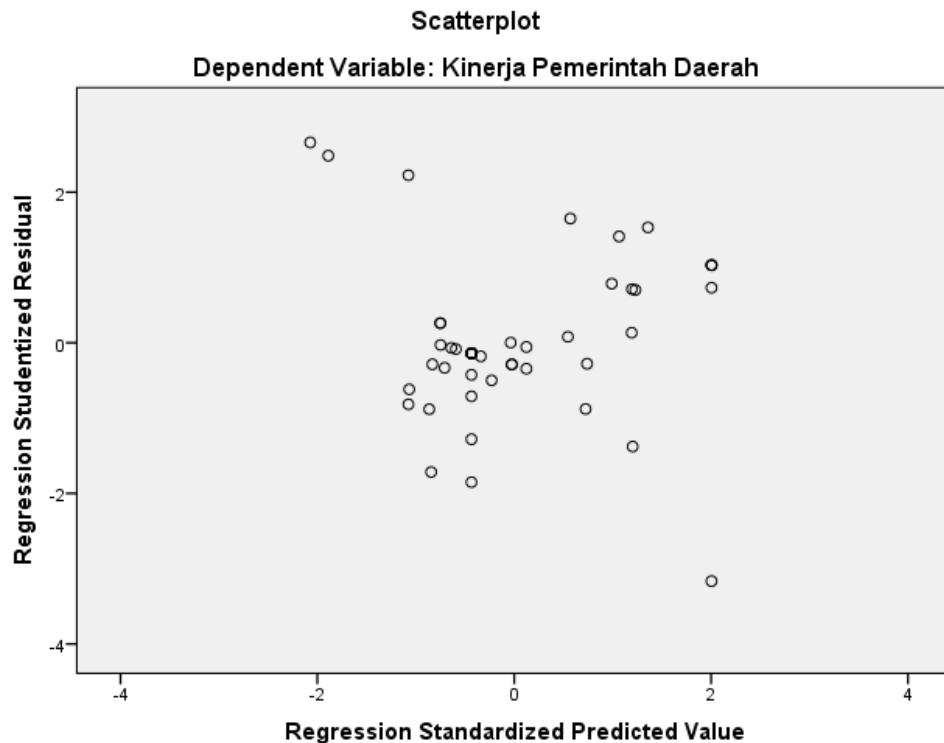
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	Pengawasan Internal	.329
	Akuntabilitas	.317
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	.751

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Apabila dicermati data yang tertera pada tabel 4.14 tersebut maka tercantum nilai tolerance pengawasan internal  $0,329 > 0,10$  dengan nilai VIF  $3,044 < 10,00$ , akuntabilitas  $0,317 > 0,10$  dengan nilai VIF  $3,158 < 10,00$ , transparansi pengelolaan keuangan daerah  $0,751 > 0,10$  dengan nilai VIF  $1,332 < 10,00$ . Dengan demikian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

#### 4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model terjadi ketidaksamaan varians dan residual suatu pengamatan lain (Umar, 2013).



**Gambar 4.2 Scatterplot**

Berdasarkan diagram scatterplot diatas, data tidak tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, secara titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, ini membuktikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.6 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.6.1 Hasil Uji Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda yang digunakan bertujuan untuk mengukur hubungan secara linear antara variabel pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada BPKPD Kabupaten Pohuwato, dari hasil perhitungan SPSS versi 20 diperoleh nilai output sebagai berikut :

**Table 4.15****Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16.221	5.797		2.798	.000
Pengawasan Internal	.199	.291	.162	1.684	.007
1 Akuntabilitas	.300	.272	.266	1.105	.005
Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah	.258	.161	.251	1.603	.005

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 4.15 diperolah nilai-nilai pada kolom B yaitu nilai *constant* sebesar 16,221; nilai pengawasan internal sebesar 0,199; akuntabilitas sebesar 0,300, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,258 sehingga :

$$Y = 16,221 + 0,199X1 + 0,300 X2 + 0,258X3$$

- Nilai konstanta (a) = 16,221 diartikan bahwa apabila semua variabel bebas yang meliputi pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah sebesar 16,221.
- Nilai koefisien b1 = 0,199 artinya variabel pengawasan memiliki nilai koefisiensi positif. Hal ini menunjukan bahwa setiap pengawasan internal sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,199 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

- c. Nilai koefisien  $b_2 = 0,300$  artinya variabel akuntabilitas memiliki nilai koefisien positif. Hal ini menunjukan bahwa pengalaman usaha sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,300 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

#### **4.6.2 Hasil Uji t**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Kriteria dalam uji t adalah jika probabilitas nilai t atau signifikansi  $< 0,05$  maka berarti hipotesis diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan, sebaliknya jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka berarti hipotesis tidak diterima atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar  $2,684 < t$  tabel sebesar 2.010, dan nilai sig  $0,007 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar  $2,145 < t$  tabel sebesar 2.010, dan nilai sig  $0,005 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar  $2,603 < t$  tabel sebesar 2,010, dan nilai sig  $0,012 > 0,05$ . Hal ini

menunjukkan bahwa transparansi pengolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### 4.6.3 Hasil Uji F

**Tabel 4.16**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	80.688	3	26.896	14.133	.000 <sup>b</sup>
1 Residual	605.235	48	12.609		
Total	685.923	51			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah, Pengawasan Internal, Akuntabilitas

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa F hitung sebesar 14,133 dan F tabel 2,794 sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan tingkat signifikan 5% diperoleh signifikansi  $0,000 < 0,05$ , artinya hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

#### 4.6.4 Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Kriteria dalam uji ini adalah apabila analisis yang digunakan adalah resgresi berganda, maka yang digunakan adalah *R Square*

**Tabel 4.17****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.343 <sup>a</sup>	.618	.162	3.551

Dari hasil output diatas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,618 atau 61,8%. Dapat diartikan bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi sebesar 61,8%. Sedangkan sisanya 38,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## 4.7 Pembahasan

### 4.7.1 Pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada variabel pengawasan internal ( $X_1$ ) didapatkan nilai t hitung sebesar  $2,684 > t$  tabel 2,010 dan nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$ , artinya pengawasan internal berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Jatmiko (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Dengan Pengawasan intern yang baik akan meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan tugas dan juga untuk mendorong terwujudnya pertanggung jawaban atas pelaksanaan

program atau kegiatan yang semakin lama semakin baik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, good governance, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semakin baik pengawasan internal yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai.

#### **4.7.2 Akuntabilitas**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada variabel pengawasan internal (X1) didapatkan nilai t hitung sebesar  $2,145 > t$  tabel 2,010 dan nilai signifikansi sebesar  $0,005 < 0,05$ , artinya akuntabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian auditya dkk (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik telah melaksanakan kegiatan anggaran dengan baik, memprogram anggaran, melaksanakan program anggaran, mengalokasikan dana anggaran sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas dalam pemerintah juga bertanggungjawab terhadap peningkatan anggaran melalui kinerja kepada masyarakat luas.

#### **4.7.3 Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3) didapatkan nilai t hitung sebesar  $2,603 > t$  tabel 2,010 dan nilai signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$ , artinya

transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Purnama dan Nadirsyah (2016) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin mudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang program penyelenggaraan pemerintah, maka praktik penyelenggaraan pemerintah tersebut dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Pemerintah daerah juga sudah melibatkan masyarakat dan organisasinya dalam proses pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan. Sehingga masyarakat merasa bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik.

#### **4.7.4 Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah.**

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan pada variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (X4) didapatkan nilai F hitung sebesar  $14,133 > F$  tabel 2,794 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , artinya transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Jatmiko (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerjan pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan internal berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai t hitung sebesar  $2,684 > t$  tabel 2,010 dan nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$
2. Akuntabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai t hitung sebesar  $2,145 > t$  tabel 2,010 dan nilai signifikansi sebesar  $0,005 < 0,05$ .
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai t hitung sebesar  $2,603 > t$  tabel 2,010 dan nilai signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$ .
4. Pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai F hitung sebesar  $14,133 > F$  tabel 2,794 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ .

#### **5.2 Saran**

Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survei melalui kuesioner, melainkan ditambah dengan melakukan wawancara. Sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya terbatas dari kuesioner yang telah diisi oleh para responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta.. Universitas Gajah Mada.
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi*. Jakarta, Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul Rohman. 2009. *Pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 9 No.1
- Abdul Hafiz Tanjung. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Auditya. L, dkk. 2013. *Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah*. Jurnal Fairness Vol.3 No.1.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Edison, Emron., dkk. 2016 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta. Bandung.
- Grahita Chandrarin. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasniati. 2016. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Vol.2 No.1 Universitas Hassanuddin: Makasar.
- Jatmiko B. 2020. *Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Sleman*. Jurnal Akuntansi Trisakti. Vol 7 No. 2.

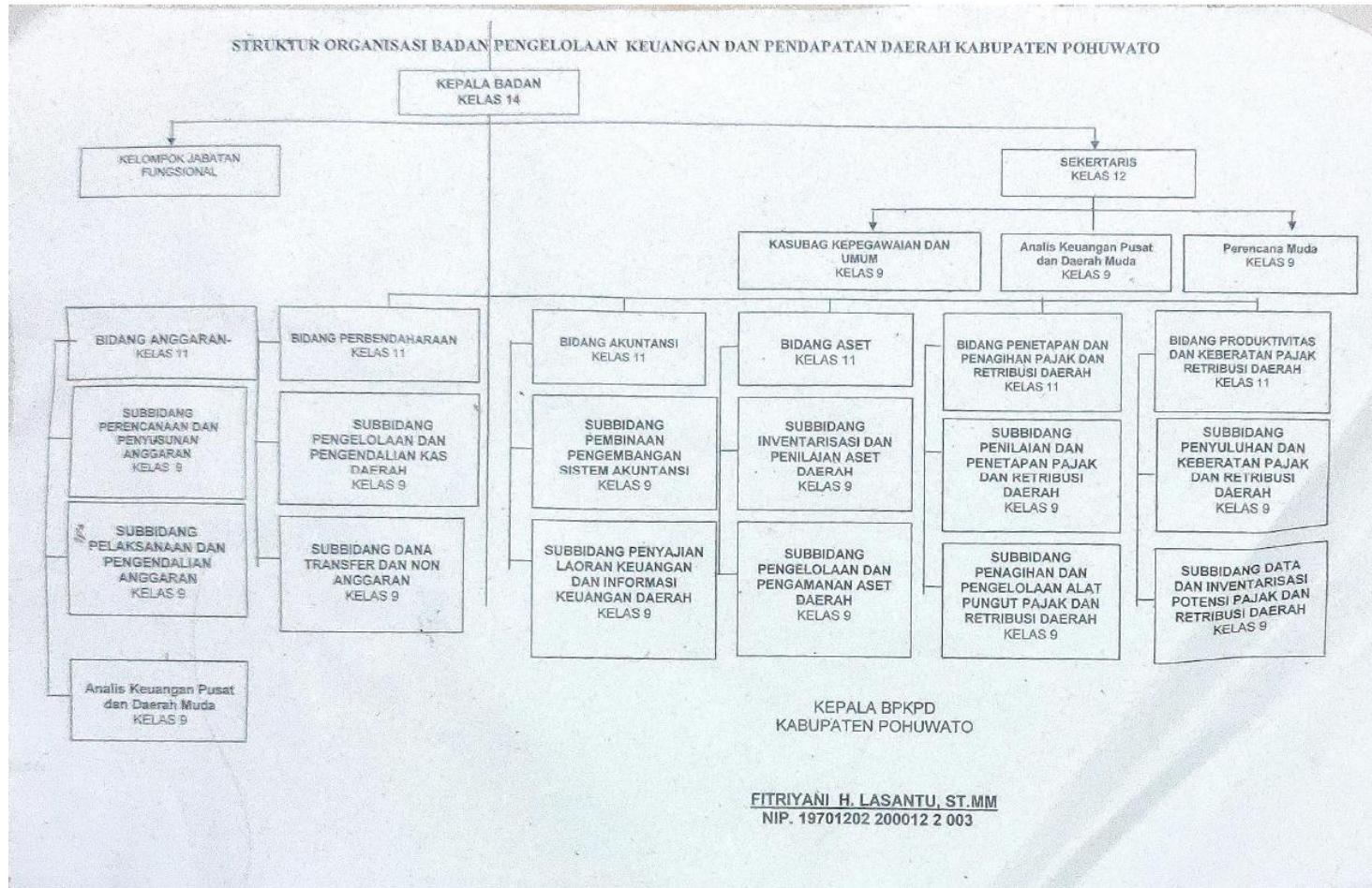
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1.
- Purnama F, Nadiryah. 2016. *Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten Aceh Barat Daya*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol.1 No.2.
- Pujiono, D. S., H. Sukarno, dan N. Puspitasari. 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan, Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara)*. Jurnal Bisnis dan Manajemen 10(1);:68-81.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Rusdiana, & Nasihudin. 2018. *Akuntabilitas kinerja dan pelaporan penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 201). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta

Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

# **LAMPIRAN**

## **Lampiran 1 Jadwal Penelitian**

## Lampiran 2 Struktur Organisasi



### Lampiran 3 Abstrak

#### ***ABSTRACT***

***INDRIYANI LIHAWA. E1119100. THE EFFECT OF INTERNAL SUPERVISION, ACCOUNTABILITY, AND TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ON LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE (A STUDY AT THE REGIONAL FINANCIAL AND REVENUE MANAGEMENT AGENCY OF POHUWATO DISTRICT)***

*The research is aimed at finding the effect of internal supervision, accountability, and transparency of local financial management on local government performance partially and simultaneously. This research is comparative causal research with a quantitative approach. The research population covers officials of the Regional Financial and Revenue Management Agency of Pohuwato District. The data analysis method employs multiple linear regression. The results show that internal supervision, accountability, and transparency of regional financial management partially have a significant effect on local government performance. While internal supervision, accountability, and transparency of regional financial management simultaneously have a significant effect on local government performance.*

*Keywords:* *internal control, accountability, transparency of regional financial management, local government performance*



## ABSTRAK

### **INDRIYANI LIHAWA. E1119100 PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA BPKPD KABUPATEN POHUWATO)**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah secara parsial dan simultan. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: pengawasan internal, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah



## Lampiran 4

### KUESIONER

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu Responden  
Di –  
Tempat

Perihal : **Permohonan Pengisian Kuesioner**

*“ Assalamu ’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh  
dan Salam Sejahtera untuk kita semua.”*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul: “Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada BPKPD kabupaten Pohuwato)”.

Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan mengganggu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu dapat berpartisipasi dalam pengisian daftar pertanyaan berdasarkan keadaan yang sebenar-benarnya. Kerahasiaan mengenai identitas, data dan jawaban kuesioner ini akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu yang telah berkenaan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini

Hormat Saya,

**Indriani Lihawa**

**NIM : E1119100**

**A. IDENTITAS RESPONDEN :**

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisa data, peneliti memerlukan data Bapak/Ibu sebagai responden. Mengingat data ini dapat mempengaruhi keakuratan penelitian, untuk itu dimohon Bapak/Ibu mengisi dengan sejurnya.

Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan data diri Bapak/Ibu dengan memberi tanda ( ✓ ) pada jawaban yang telah disediakan

Nomor Responden : ..... (diisi oleh

peneliti)

Nama : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin  : Laki- laki  Perempuan

Pendidikan Terakhir  : SMA  MK S1

Diploma  S2

Lama Bekerja :  < 5 tahun  5-10 tahun  >10 tahun

Jabatan : .....

## B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Adapun petunjuk kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) diharapkan untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan jujur dan apa adanya
2. Berilah tanda (✓) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapak/Ibu/Saudara(i) pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini.
4. Terdapat 5 (lima) alternatif jawaban yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut:

<b>Simbol</b>	<b>Kategori</b>	<b>Bobot Nilai</b>
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
N	Ragu/Netral	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

## 1. Pengawasan Internal

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Satuan Pengawasan Internal selalu membuat laporan pemeriksaan (audit) sesuai dengan temuan-temuan pemeriksaan.					
2	Menggunakan prosedur analitis dalam perencanaan dan review audit					
3	Dengan adanya Pengawasan Internal disiplin aparatur pemerintah dapat ditingkatkan					
4	Penyalahgunaan wewenang oleh aparatur dapat dicegah dan dipantau dengan adanya pengawasan internal					
5	Terdapat struktur organisasi yang jelas menerangkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab					
6	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi					
7	Keberadaan pengawasan Internal dapat mempercepat penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan.					

## 2. Akuntabilitas

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.					
2	Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya serta mempunyai kepentingan bagi publik.					
3	Program-program dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik.					
4	Pelaksanaan program-program dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.					
5	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan					

6	Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan (accountable) hasil dari suatu program/ kegiatan/ proyek yang telah dilakukan.					
7	Pimpinan dan pegawai selalu terlibat selalu bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/kegiatan/proyek.					
8	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku.					

### 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah.					
2	Pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif agar semua program tercapai sesuai target.					
3	Pengelolaan keuangan dilakukan secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan dan tidak produktif.					
4	Masyarakat mengetahui mengenai APBD.					
5	Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah.					
6	Laporan Keuangan dibuat sesuai SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.					
7	Laporan Keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan					
8	Laporan Keuangan dan Laporan hasil audit BPK dipublikasikan di website resmi Pemerintah Daerah.					

### 4. Kinerja Pemerintah

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Pada instansi tempat Saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin.					
2	Pada instansi tempat Saya bekerja, terdapat					

	keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan				
3	Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik - baiknya dan tepat pada waktunya sesuai dengan target kerja yang telah ditentukan.				
4	Melaporkan setiap hasil kerja kepada atasan menurut keadaan yang sebenarnya.				
5	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.				
6	Pada instansi tempat saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.				
7	Pada instansi tempat Saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program				

**Lampiran 6 Hasil Jawaban Kuesioner Pengawasan Internal (X1)**

<b>No Responden</b>	<b>Pengawasan Internal (X1)</b>							<b>Jumlah</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	5	35
6	4	4	4	4	4	4	4	28
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	4	4	4	4	4	5	29
10	4	4	4	5	5	4	4	30
11	4	5	4	4	4	4	5	30
12	3	3	4	3	3	3	4	23
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	5	4	5	4	4	5	5	32
17	5	5	5	5	5	5	5	35
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	4	4	4	4	4	4	4	28
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	5	4	5	5	4	5	5	33
23	5	4	5	5	4	5	5	33
24	5	4	5	5	4	5	5	33
25	5	4	5	5	4	5	5	33
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	4	4	4	4	4	4	4	28
28	5	5	4	4	4	4	4	30
29	5	5	4	4	4	4	4	30
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	4	4	4	4	5	4	4	29
32	4	4	4	4	4	5	5	30
33	4	5	4	4	4	4	4	29



## Lampiran 7 Hasil Jawaban Kuesioner Akuntabilitas (X2)



## Lampiran 8 Hasil Jawaban Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)



## Lampiran 9 Hasil Jawaban Kuesioner Kinerja Pemerintah Daerah (Y)



## Lampiran 10

### Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengawasan Internal	52	23	35	29.48	2.980
Akuntabilitas	52	26	40	33.50	3.251
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	52	24	40	33.52	3.573
Kinerja Pemerintah Daerah	52	21	35	29.04	3.667
Valid N (listwise)	52				

### Hasil Uji Validitas

**Correlations**

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Total.X1
Pearson Correlation	1	.602**	.613**	.598**	.370**	.659**	.564**	.782**
X1.1 Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.007	.000	.000	.000
N	52	52	52	52	52	52	52	52
Pearson Correlation	.602**	1	.392**	.434**	.470**	.448**	.378**	.659**
X1.2 Sig. (2-tailed)	.000		.004	.001	.000	.001	.006	.000
N	52	52	52	52	52	52	52	52
Pearson Correlation	.613**	.392**	1	.744**	.489**	.870**	.871**	.881**
X1.3 Sig. (2-tailed)	.000	.004		.000	.000	.000	.000	.000
N	52	52	52	52	52	52	52	52
Pearson Correlation	.598**	.434**	.744**	1	.742**	.835**	.648**	.880**
X1.4 Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.000	.000	.000
N	52	52	52	52	52	52	52	52
Pearson Correlation	.370**	.470**	.489**	.742**	1	.600**	.359**	.702**
X1.5 Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000	.000		.000	.009	.000
N	52	52	52	52	52	52	52	52
Pearson Correlation	.659**	.448**	.870**	.835**	.600**	1	.830**	.928**
X1.6 Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000		.000	.000
N	52	52	52	52	52	52	52	52
Pearson Correlation	.564**	.378**	.871**	.648**	.359**	.830**	1	.827**
X1.7 Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.000	.009	.000		.000

	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Total.	Pearson Correlation	.782 **	.659 **	.881 **	.880 **	.702 **	.928 **	.827 **	1
X1	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 11

Correlations										
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Total.X2
	Pearson Correlation	1	.553 **	.679 **	.710 **	.523 **	.561 **	.637 **	.664 **	.828 **
X2.1	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.553 **	1	.518 **	.642 **	.482 **	.480 **	.502 **	.287 *	.679 **
X2.2	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.039	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.679 **	.518 **	1	.703 **	.657 **	.696 **	.484 **	.664 **	.830 **
X2.3	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.710 **	.642 **	.703 **	1	.515 **	.573 **	.586 **	.614 **	.828 **
X2.4	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.523 **	.482 **	.657 **	.515 **	1	.776 **	.638 **	.677 **	.801 **
X2.5	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.561 **	.480 **	.696 **	.573 **	.776 **	1	.656 **	.757 **	.851 **
X2.6	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.637 **	.502 **	.484 **	.586 **	.638 **	.656 **	1	.758 **	.811 **
X2.7	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.664 **	.287 *	.664 **	.614 **	.677 **	.757 **	.758 **	1	.844 **
X2.8	Sig. (2-tailed)	.000	.039	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.828 **	.679 **	.830 **	.821 **	.808 **	.850 **	.818 **	.844 **	
Total.X2	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations									
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	To
	Pearson Correlation	1	.610**	.727**	.708**	.619**	.710**	.759**	.523**
X3.1	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.610**	1	.491**	.578**	.571**	.643**	.747**	.369**
X3.2	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.007
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.727**	.491**	1	.781**	.619**	.775**	.689**	.523**
X3.3	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.708**	.578**	.781**	1	.766**	.823**	.805**	.686**
X3.4	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.619**	.571**	.619**	.766**	1	.593**	.564**	.590**
X3.5	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.710**	.643**	.775**	.823**	.593**	1	.871**	.503**
X3.6	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.759**	.747**	.689**	.805**	.564**	.871**	1	.459**
X3.7	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.001
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.523**	.369**	.523**	.686**	.590**	.503**	.459**	1
X3.8	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.000	.000	.000	.000	.001	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.851**	.766**	.841**	.920**	.798**	.892**	.891**	.687**
Total.X3	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Correlations**

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Total.Y
	Pearson Correlation	1	.706**	.788**	.653**	.521**	.444**	.560**	.833**
Y.1	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.706**	1	.794**	.566**	.574**	.468**	.475**	.806**
Y.2	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.788**	.794**	1	.826**	.633**	.548**	.624**	.909**
Y.3	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.653**	.566**	.826**	1	.768**	.628**	.756**	.883**
Y.4	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.521**	.574**	.633**	.768**	1	.554**	.724**	.802**
Y.5	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.444**	.468**	.548**	.628**	.554**	1	.786**	.743**
Y.6	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.560**	.475**	.624**	.756**	.724**	.786**	1	.829**
Y.7	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
	Pearson Correlation	.833**	.806**	.909**	.883**	.802**	.743**	.829**	1
Total.Y	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Lampiran 12**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	52	100.0
Cases Excluded <sup>a</sup>	0	.0
Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.912	7

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	25.19	6.668	.695	.903
X1.2	25.27	7.063	.537	.920
X1.3	25.25	6.466	.833	.888
X1.4	25.31	6.452	.830	.888
X1.5	25.40	7.108	.605	.911
X1.6	25.29	6.092	.893	.880
X1.7	25.17	6.499	.753	.897

**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	52	100.0
Cases Excluded <sup>a</sup>	0	.0
Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.925	8

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	29.33	7.911	.761	.914
X2.2	29.29	8.758	.591	.926
X2.3	29.31	8.178	.774	.913
X2.4	29.33	8.264	.764	.914
X2.5	29.23	8.416	.751	.915
X2.6	29.31	7.943	.794	.911
X27	29.35	7.995	.750	.915
X2.8	29.37	7.962	.787	.912

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	52	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items

.935	8
------	---

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	29.23	9.789	.801	.924
X3.2	29.40	9.775	.679	.935
X3.3	29.23	9.828	.788	.925
X3.4	29.37	9.727	.893	.918
X3.5	29.46	9.979	.732	.929
X3.6	29.25	9.485	.852	.920
X3.7	29.25	9.681	.853	.921
X3.8	29.44	10.644	.605	.937

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	52	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.919	7

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
--	----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Y.1	25.02	9.078	.738	.914
Y.2	24.98	9.941	.726	.910
Y.3	24.90	9.344	.866	.894
Y.4	24.83	10.264	.843	.900
Y.5	24.88	10.575	.739	.909
Y.6	24.75	10.662	.659	.916
Y.7	24.87	10.236	.767	.906

### Lampiran 13

#### Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.44490212
	Absolute	.172
Most Extreme Differences	Positive	.172
	Negative	-.134
Kolmogorov-Smirnov Z		1.243
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091

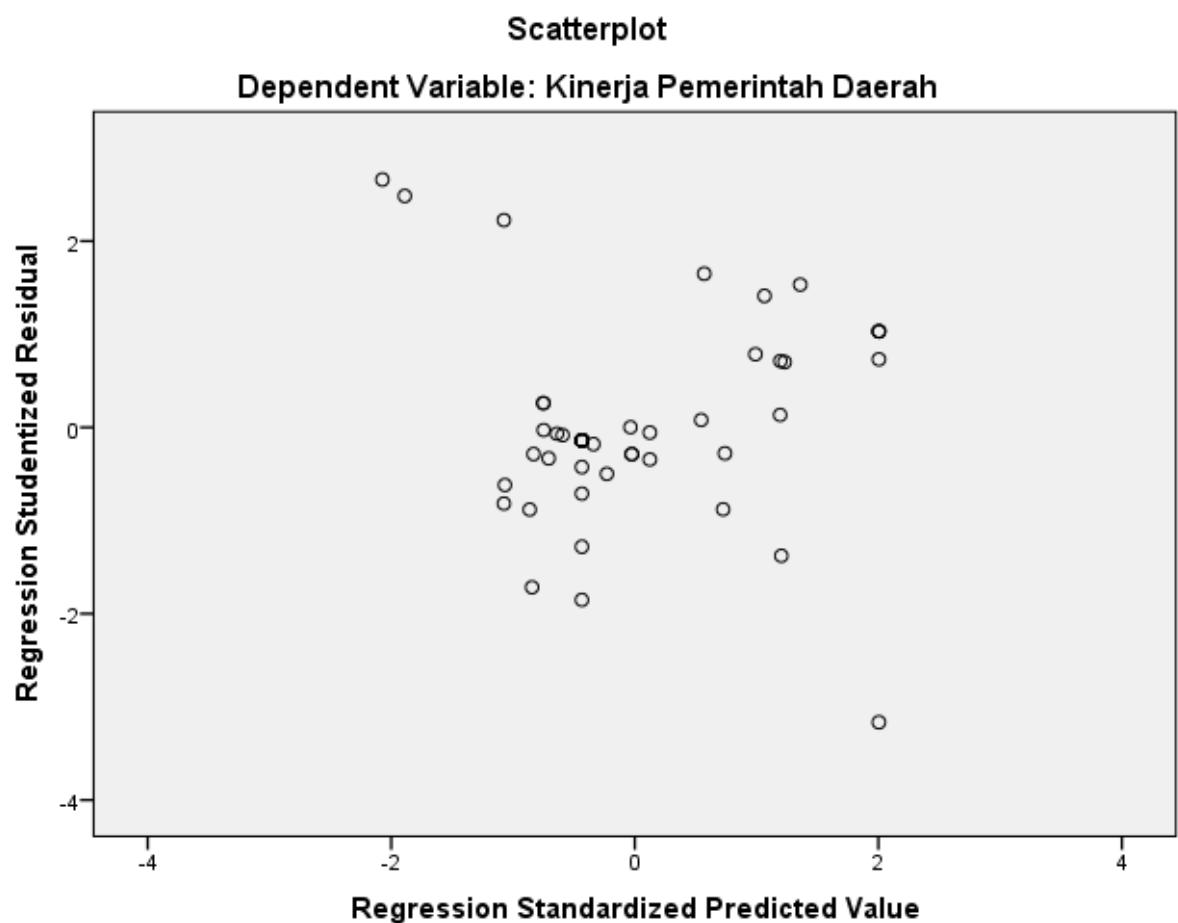
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Hasil Uji Multikolonearitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Tolerance	VIF
1	Pengawasan Internal	.329	3.044
	Akuntabilitas	.317	3.158
	Transparansi Pengelolaan		
	Keuangan Daerah	.751	1.332

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

**Lampiran 14****Hasil Uji Heteroskedastisitas**

## Lampiran 15

### Hasil Output Regression

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.343 <sup>a</sup>	.618	.162	3.551

a. Predictors: (Constant), Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah, Pengawasan Internal, Akuntabilitas

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80.688	3	26.896	14.133	.000 <sup>b</sup>
	Residual	605.235	48	12.609		
	Total	685.923	51			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah  
b. Predictors: (Constant), Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah, Pengawasan Internal, Akuntabilitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.221	5.797		2.798 .000
	Pengawasan Internal	.199	.291	.162	2.684 .007
	Akuntabilitas	.300	.272	.266	2.145 .005
	Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah	.258	.161	.251	2.603 .012

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

## Lampiran 16 Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp. (0435) 8724466, 829975 E-mail [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

---

No. .... 110/PIP/LEMILIT-UNISAN/I/2023  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada YTH.  
Kepala Kesbangpol Kabupaten Pohuwato  
Di  
Tempat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	DR. Rahmisvari, ST.,SE.,MM
NIDN	:	0929117202
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa	:	Indriani Libawa
NIM	:	E1119100
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Lokasi Penelitian	:	Badan Keuangan Daerah Kab. Pohuwato
Judul penelitian	:	Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah ( Studi Kasus pada BPKPD Kabupaten Pohuwato).

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 28 Januari 2023

**DR. Rahmisvari, ST.,SE.,MM**  
NIDN : 0929117202

## Lampiran 17 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO  
BAND PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

*Jln. MH Tamrin No. 1 Blok Plan Perkantoran Tlp. (0443) 210484 Fax. (0443) 210856*

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 900/BPKPD/252/IV/2023

Yang ber tanda tangan di bawah, sekertaris badan keuangan daerah kabupaten pohuwatomenerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : INDRIYANI LIHAWA  
 Nim : E1119100  
 Fakultas : Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo  
 Jurusan : Akuntansi  
 TTL : MARISA, 29 MEI 1999  
 Alamat : Desa Taluduyunu Utara Kec. Buntulia kab. Pohuwato

PENGABUH PENDAWASAH INTERNAL  
 Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul "AKUNTABILITAS DAN  
 TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHuwATO (STUDI KASUS PADA BADAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POHuwATO)".  
 Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Marisa, 11 April 2023

Mengetahui

An. Kepala BPKPD Kab. Pohuwato  
 Sekertaris



**SUWARTONO HUCAWA, SE**  
 NIP. 19750302 200003 1 003

## Lampiran 18 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi



SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI  
No. 102/SRP/FE-UNISAN/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN	09281169010
Jabatan	Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa	: Indriani Lihawa
NIM	: E1119100
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Judul Skripsi	: Pengaruh Pengawasan Internal Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BKD Kabupaten Pohuwato)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujian. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 08 April 2023  
Tim Verifikasi:

Mengetahui  
  
 DR. Musafir, SE., M.Si  
 NIDN. 0928116901

Muh. Sabir M, SE., M.Si  
 NIDN. 0913088503

Terlampir Hasil Pengecekan Turnitin

## Lampiran 19 Hasil Turnitin

Turnitin



**Similarity Report ID:** oid:25211:33534555

PAPER NAME  
**SKRIPSI INDRIYANI LIHAWA.docx**

AUTHOR  
**INDRIANI LIHAWA**

WORD COUNT  
**10034 Words**

CHARACTER COUNT  
**67625 Characters**

PAGE COUNT  
**67 Pages**

FILE SIZE  
**200.7KB**

SUBMISSION DATE  
**Apr 4, 2023 12:59 PM GMT+8**

REPORT DATE  
**Apr 4, 2023 1:00 PM GMT+8**

### ● 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

100%



**Similarity Report ID:** oid:25211:33534555

### ● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

#### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>core.ac.uk</b>	6%
	Internet	
2	<b>eprints.ung.ac.id</b>	4%
	Internet	
3	<b>baperlitbang.pohuwatokab.go.id</b>	2%
	Internet	
4	<b>123dok.com</b>	1%
	Internet	
5	<b>dilibadmin.unismuh.ac.id</b>	1%
	Internet	
6	<b>repository.utu.ac.id</b>	1%
	Internet	
7	<b>jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id</b>	1%
	Internet	
8	<b>repository.uin-suska.ac.id</b>	1%
	Internet	

 turnitin		
<b>Similarity Report ID:</b> oid:25211:33534555		
9	eprints.umpo.ac.id Internet	<1%
10	repository.stei.ac.id Internet	<1%
11	text-id.123dok.com Internet	<1%
12	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet	<1%
13	Neni Triana M., Farah Juniaty Meutianingrum. "Pengaruh Halal Brand I... Crossref	<1%
14	eprints.uny.ac.id Internet	<1%
15	eprints.unmas.ac.id Internet	<1%
16	repository.upi.edu Internet	<1%
17	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
18	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-20 Submitted works	<1%
19	siat.ung.ac.id Internet	<1%
20	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 Submitted works	<1%



Similarity Report ID: oid:25211:33534555

- |           |   |     |
|-----------|---|-----|
| <b>21</b> | repository.uin-alauddin.ac.id   | <1% |
|           | Internet  |     |
| <b>22</b> | repository.unwim.ac.id  | <1% |
|           | Internet  |     |
| <b>23</b> | repository.usu.ac.id  | <1% |
|           | Internet  |     |
| <b>24</b> | eprints.iain-surakarta.ac.id  | <1% |
|           | Internet  |     |
| <b>25</b> | repository.unibos.ac.id   | <1% |
|           | Internet  |     |
| <b>26</b> | media.neliti.com  | <1% |
|           | Internet  |     |
| <b>27</b> | repository.untag-sby.ac.id  | <1% |
|           | Internet  |     |
| <b>28</b> | Um Fajri Ramadanti, Willy Abdillah, Robinson Robinson. "PENGARUH P... | <1% |
|           | Crossref  |     |

**Lampiran 20                  Curriculum Vitae****1. Identitas Pribadi**

Nama	:	INDRIYANI LIHAWA
NIM	:	E1119100
Tempat/Tgl Lahir	:	Marisa, 29 Mei 19990
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Taluduyunu Utara, Kec.Buntulia Kab. Pohuwato

**2. Riwayat Pendidikan**

1. Menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN Inpres Karya Indah pada tahun 2012
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya Yakni di SMP Negeri 1 Buntulia dan Lulus Pada tahun 2015
3. Selanjutnya melanjutkan ke jenjang berikutnya yakni di SMA Negeri 1 Buntulia dan Lulus pada Tahun 2018
4. Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas ichsan Gorontalo, mengambil Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi pada tahun 2019

